

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Secara umum, evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD Provinsi Papua serta dilakukan dengan beberapa tahap yakni (1) evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) evaluasi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) evaluasi penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) evaluasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) evaluasi penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) evaluasi penetapan APBD.
2. Ada ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pada pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terlalu signifikan. Kondisi demikian didukung dengan data tingkat rasio kemandirian selalu berada pada persentase di bawah 10% sejak tahun 2016-2020. Begitu pula pada rasio aktivitas, di mana dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan dana belanja rutin terhadap APBD.

5.2. Saran

1. Pemerintah Provinsi Papua harus melakukan evaluasi penggunaan APBD agar tingkat kemandirian meningkat di tahun-tahun berikutnya.
2. Pemerintah Provinsi Papua sebaiknya lebih meminimalisir belanja rutin terhadap APBD agar dapat menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.
3. Pemerintah Provinsi Papua sebaiknya terus menjaga nilai positif pada rasio efektivitas dan efisiensi APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 23-36.
- Afandi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Riau: Zanafa Publishing.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2014). *Pengantar Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Fitria, F. (2017). *Kinerja Pegawai Pada Subbag Umum Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY*. Yogyakarta: UNY.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hamid, P. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ma'ruf. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mathis, & Jackson. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priharjanto, A., & Hadiwibowo, Y. (2021). Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara. *Info Artha*, 5(2), 108-117.
- Ruky. (2008). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Y. A. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan*. Medan: Universitas Medan Area.
- Siswanti, T. (2021). Anggaran Produksi Sebagai Dasar Penentuan Anggaran Biaya Bahan Baku Pada CV. Al-Falah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 6(2), 120-131.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press].
- Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 61-70.
- Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi*, 6(1), 63-76.
- Wibowo, T. (2018). Model Pengawasan Internal Pemerintah Terhadap Penguatan Kapasitas Fiskal. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 917-933.

